

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Geografis Pulau Jawa

Pulau Jawa adalah salah satu pulau terbesar yang berada di Indonesia dan merupakan pulau tersebar ke 13 di dunia. Dengan luas sekitar 126.700 km² dengan populasi sekitar 160.293.748 jiwa, menjadikan Pulau Jawa Menjadi Pulau dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dan Indonesia. Sekitar 60% penduduk di Indonesia berada tinggal di Pulau Jawa. Jakarta dan Surabaya menjadi kota terbesar di Pulau Jawa sekaligus menjadi kota dengan kepadatan penduduk paling besar. Berikut peta Pulau Jawa dan pembagian provinsinya:



Sumber : BNPB RI, 2016

GAMBAR 4-1

Peta Pulau Jawa

Pulau Jawa memiliki rata-rata kepadatan sekitar 1.317 jiwa/km. Pulau Jawa sebagian besar terbentuk aktivitas vulkanik dengan deratan gunung berapi baik aktif maupun pasif dari ujung barat sampai ujung timur pulau. Masyarakat Pulau Jawa memiliki beragam karakteristik berbeda mulai dari bahasa, adat sampai perilaku. Umumnya masyarakat Pulau Jawa bisa menguasai beberapa bahasa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasionalitas, dan bahasa daerah. Bahasa daerah di Pulau Jawa sangat beragam ada Bahasa Jawa yang biasanya dipakai oleh masyarakat Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur, Bahasa Sunda pada masyarakat Jawa Barat dan Bahasa Betawi pada masyarakat DKI Jakarta pada umumnya.

TABEL 4.1
KONDISI GEOGRAFIS PULAU JAWA TAHUN 2015

Provinsi	Ibu Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (ribu)
DKI Jakarta	Jakarta	664,01	10.177,90
Jawa Barat	Bandung	35.377,76	46.709,60
Jawa Tengah	Semarang	32.800,69	33.774,10
DI Y	Yogyakarta	3.133,15	3.679,20
Jawa Timur	Surabaya	47.799,75	38.874,60
Banten	Serang	9.662,92	11.955,20

Sumber : BPS, 2016 (diolah)

Ibu kota Indonesia, DKI Jakarta, terletak di Jawa bagian barat laut berbatasan dengan Provinsi Banten dan Jawa barat. Dengan luas wilayah paling kecil dibandingkan dengan provinsi lain, Jakarta menyandang predikat provinsi terpadat penduduk dengan populasi sekitar 10.177 ribu

jiwa. Sebagai ibu kota Negara, Jakarta memiliki peran penting dalam proses keberlangsungan pemerintahan Indonesia. Pusat dari seluruh kegiatan kenegaraan, dari legislatif, eksekutif, yudikatif sampai perekonomian. Sebagai pusat tata negara tentu DKI Jakarta memiliki daya tarik tersendiri untuk masyarakat dari luar daerah untuk datang entah dalam faktor ekonomi maupun faktor lain. Selain itu sebagai pusat perekonomian, Jakarta memiliki peran dalam hampir seluruh kegiatan perekonomian diantaranya perdagangan, hingga industri. Provinsi kedua dengan kepadatan penduduk tinggi adalah Provinsi Banten, walaupun provinsi ini baru dibentuk pada tahun 2002 lalu, provinsi ini memiliki kelebihan yang membuat adanya daya tarik tersendiri diantaranya lokasinya yang berbatasan dengan Pulau Sumatera dan berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta, beberapa kota/kabupatennya termasuk wilayah *commuter* atau wilayah luar dari wilayah padat penduduk kota Jakarta dan kawasan Industri seperti Tangerang, sehingga tak heran jika kondisi perekonomian di provinsi ini cepat berkembang walau notabene masih terbilang baru.

Di provinsi besar lain di Pulau Jawa, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, pusat area industri juga terdapat di ibu kota provinsi masing-masing provinsi. Di Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, dengan dukungan pelabuhan Tanjung Mas, Semarang menjadi salah satu kota industri dan transportasi antar pulau yang maju. Sedangkan Surabaya, memiliki area industri yang cukup dikenal sebagai salah satu pusat

industri terbesar untuk wilayah Indonesia timur. Dengan predikat-predikat besar ini provinsi-provinsi di Pulau Jawa memiliki banyak potensi perekonomian yang dapat menyokong perekonomian Indonesia dengan angka laju pertumbuhan perekonomian yang tinggi.

Majunya pembangunan seperti sarana prasarana jaringan transportasi adalah salah satu faktor utama pesatnya perkembangan perekonomian di Pulau Jawa. Sejak masa penjajahan Belanda pada sekitar abad ke 18, Batavia yang sekarang DKI Jakarta adalah pusat administrasi baik pemerintahan maupun perekonomian, dan dijadikan pusat perdagangan. Lalu Belanda juga membangun jalan yang melintas dari sisi barat sampai timur Pulau Jawa pada saat masa pemerintahan Deandles atau disebut dengan Jalan Raya Pos Jawa pada awal abad 19. Majunya perekonomian terutama pada sektor pertanian dan perkebunan pada saat itu membuat pemerintah Hindia Belanda membangun segala kebutuhan transportasi diantaranya jaringan kereta api dan pelabuhan yang memudahkan pemindahan hasil produksi dari pedalaman Pulau Jawa menuju pelabuhan. Dewasa ini beberapa kota besar di Pulau Jawa menjadi kota pusat perekonomian yang berkembang dengan pesat, diantaranya Jakarta, Surabaya, Semarang dan Bandung. Sementara kota besar lain seperti Yogyakarta, Surakarta dan Cirebon berhasil tetap memegang teguh sebagai kota kesultanan yang tetap menjaga warisan budaya asli Jawa. Kawasan industri juga dimiliki oleh kota-kota di Pulau Jawa pada sepanjang pantai utara Jawa seperti Tangerang, Bekasi,

Karawang, dan Gresik. Jaringan jalan tol juga dimiliki Pulau Jawa yang dapat menghubungkan kota-kota besar dan terdapat 16 jalan raya nasional yang menghubungkan berbagai kota di Pulau Jawa.

Investor pula banyak menginvestasikan sebagian besar modal di kota ini karena selain faktor lokasi strategis juga faktor sumber daya yang melimpah. Banyaknya industri yang dibangun memberi dampak positif pada kondisi perekonomian daerah pada umumnya. Angka pengangguran dapat diturunkan meski angka angkatan kerja yang cukup tinggi pula berikut data tentang sumber daya manusia di Pulau Jawa.

TABEL 4.2
KONDISI PENDUDUK PULAU JAWA TAHUN 2015 (Dalam Jiwa)

Provinsi	Angkatan Kerja	Tenaga Kerja	Pengangguran
DKI Jakarta	5.092.219	4.724.029	368.190
Jawa Barat	20.586.356	18.791.482	1.794.874
Jawa Tengah	17.298.925	16.435.142	863.783
DI Yogyakarta	1.971.463	1.891.218	80.245
Jawa Timur	20.274.681	19.367.777	906.904
Banten	5.334.843	4.825.460	509.383

Sumber : BPS, 2016 (diolah)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah angkatan kerja terbesar di Pulau Jawa dan hanya selisih sekitar 300.000 jiwa dengan Provinsi Jawa Timur, namun angka pengangguran Jawa Barat lebih tinggi dari pada Jawa Timur. Dengan kondisi lain, DI Yogyakarta memiliki jumlah angkatan kerja yang paling rendah dari pada provinsi lain, angka penganggurannya juga paling rendah dengan hanya sekitar 1% dari angkatan kerja yang merupakan pengangguran.

B. Profil Provinsi di Pulau Jawa

1. Provinsi DKI Jakarta

Menyandang predikat sebagai satu-satunya kota yang memiliki status provinsi dan ibu kota Negara Republik Indonesia, Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda dengan nama Batavia. Kota dengan luas total 7.659,02 km² ini memiliki luas daratan hanya sekitar 661,52 km², dengan total populasi 9.988.329 penduduk. Jakarta adalah salah satu provinsi dengan luas wilayah terkecil di Indonesia, namun dengan jumlah penduduk besar provinsi ini dikenal dengan kepadatan penduduknya. Tingkat urbanisasi yang tinggi dari daerah lain di Indonesia ke provinsi ini sangat tinggi. Sehingga dengan meningkatnya jumlah pendatang, wilayah ini menjadi semakin sempit.



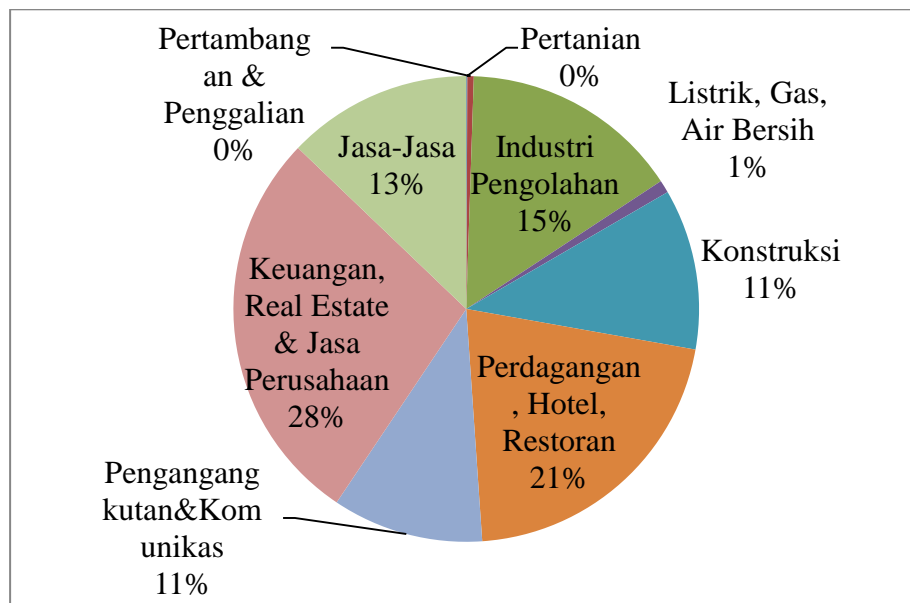
Sumber : BPS, 2016

GAMBAR 4-2
Peta Provinsi DKI Jakarta

Jakarta terletak di pesisir bagian barat Pulau Jawa, berbatasan langsung dengan Provinsi Banten di sisi barat daya dan Jawa Barat di sebelah timur dan tenggara. Wilayah Jakarta yang padat menyebabkan beberapa kota disekitarnya menjadi kota yang hampir menyerupai kota Jakarta itu sendiri, seperti yang dikenal dengan Jabodetabek, kota lain seperti Bogor dan Depok yang berada di Provinsi Jawa Barat dan Tangerang serta Bekasi yang berada di Provinsi Banten. Provinsi DKI Jakarta sendiri dibagi menjadi 5 kota yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Termasuk kepulauan seribu. Masyarakat di provinsi ini juga beragam, warga asli atau dikenal dengan Suku Betawi, bercampur dengan hampir semua suku yang ada di Indonesia. Beragamnya kebudayaan di provinsi ini dikarenakan banyaknya jumlah pendatang baik dari Pulau Jawa maupun pulau-pulau lain. Kegiatan perekonomian yang ada di Provinsi ini juga sangat beragam seperti yang diperlihatkan dalam **DIAGRAM 4.1**. Dari grafik dibawah dapat diketahui bahwa sebagian besar kegiatan perekonomian yang ada cukup merata ke beberapa sektor. Sektor yang memiliki angka tertinggi adalah di bidang Keuangan, Real Estate dan jasa perusahaan dengan angka 28%. Sedangkan di posisi kedua adalah pada bidang Perdagangan, Hotel dan restoran dengan angka 21%. Hal ini sangat terlihat dari sektor ekonomi di pasar-pasar maupun pusat perbelanjaan yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya karena kebutuhan masyarakat di

provinsi ini. Sedangkan pada bidang lain misalnya jasa-jasa dengan angka 13% , konstruksi, angkutan umum dan komunikasi, dan industri jumlahnya hampir sama namun juga cukup banyak. Sedangkan dalam bidang pertanian dan pertambangan hampir tidak ada kontribusi di provinsi ini.

DIAGRAM 4.1
Struktur Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015



Sumber : BPS, 2016

Sementara kondisi realisasi anggaran penerimaan dan pengeluaran pada **TABEL 4.3** dibawah ini, memperlihatkan angka yang cukup tinggi, angka cukup tinggi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perekonomian yang cukup tinggi efektif terhadap anggaran baik penerimaan maupun penerimaan. Dari keempat komponen utama penerimaan dan pengeluaran pemerintah provinsi dibawah, PAD Provinsi Jakarta meningkat dengan pesat dari Tahun 2013 ke 2014 hampir 5 triliun Rupiah sedangkan dana perimbangan pada Tahun

2015 mengalami penurunan dari Tahun 2014 sebanyak 4 triliun Rupiah. Namun hal tersebut dibarengi dengan peningkatan belanja tidak langsung pemerintah yang pada Tahun 2015 meningkat sedingkinnya sebanya 8 triliun Rupiah, namun pada belanja langsung mengalami penurunan kira-kira sebanyak 3 triliun Rupiah.

TABEL 4.3
REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PROVINSI
DKI JAKARTA (DALAM RIBU RUPIAH)

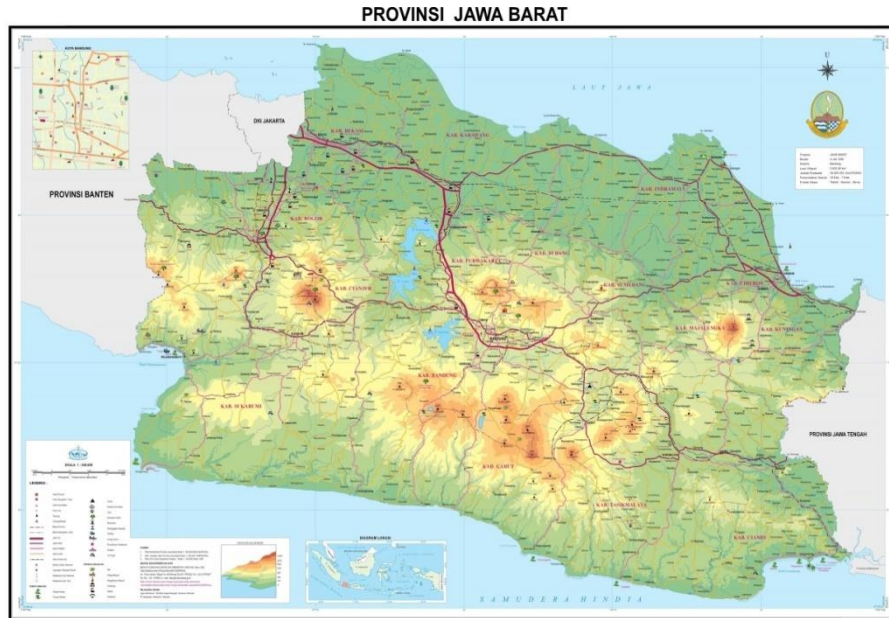
Penerimaan	2013	2014	2015
Pendapatan Asli Daerah	26.852.192.453	31.274.215.886	33.686.176.815
Dana Perimbangan	9.387.539.402	9.677.533.225	5.887.267.645
Pengeluaran			
Belanja Tidak Langsung	13.148.602.086	12.631.884.602	20.707.205.013
Belanja Langsung	25.152.900.311	25.167.779.696	22.324.117.934

Sumber : BPS, 2016 (diolah)

2. Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa barat memiliki total luas sekitar 35.222,18 km² dengan total populasi sekitar 52.476.473 jiwa. Dengan memiliki 18 kabupaten dan 9 kota, Provinsi ini memiliki pemberdayaan daerah yng cukup luas dengan Bandung sebagai Ibu kota. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terbesar di Pulau Jawa. Dengan keberagaman penampakan geografinya, potensi alam dan potensi ekonomi provinsi ini cukup banyak. Perekonomian sangat berkembang pada daerah pantai utara, dan memiliki pertumbuhan

ekonomi pesat selain kota besar lain yaitu Bandung maupun Bogor.
Berikut peta Provinsi Jawa Barat.



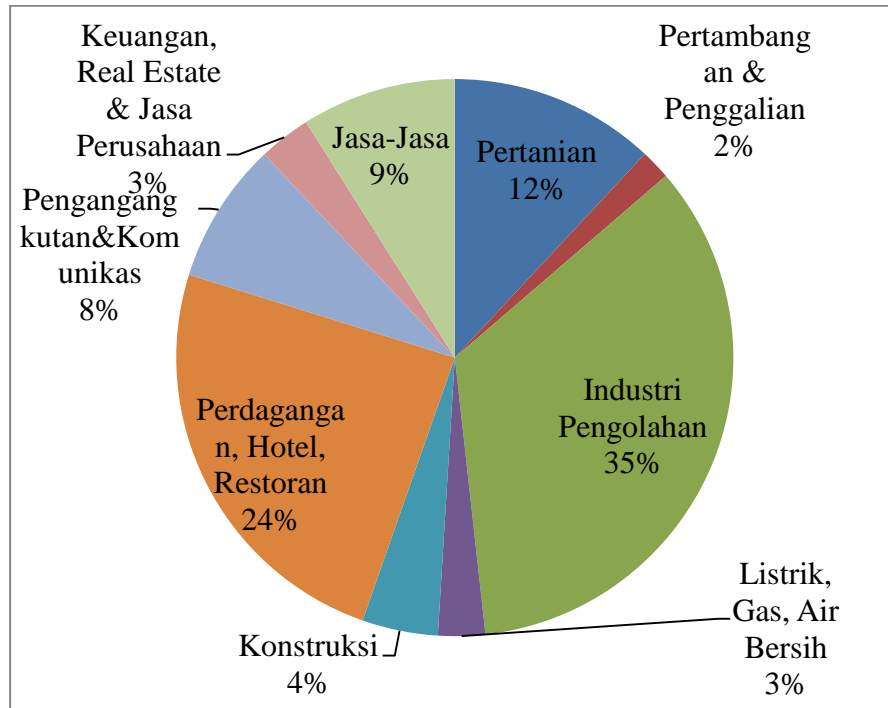
Sumber : BPS, 2016

GAMBAR 4-3
Peta Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat memiliki kota besar seperti Bandung yang juga sebagai ibu kota, Depok, Bogor, Cirebon, dan kota-kota lain termasuk beberapa kota di jalur pantai utara yang dikenal sebagai jalur perekonomian yang besar. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6% per tahun, Jawa Barat memiliki banyak keberagaman bidang perekonomian yang ditekuni oleh masyarakatnya diantaranya ditunjukkan dari diagram **DIAGRAM 4.2**. Bidang yang terbesar adalah industri pengolahan dengan 35% perekonomian masyarakat berada dalam bidang ini, kedua adalah bidang perdagangan, hotel, dan restoran dengan 24%, bidang pertanian berada pada posisi ketiga

yaitu dengan angka 12%. Sedangkan bidang-bidang lain seperti pertambangan, keuangan *real estate*, angkutan, konstruksi, jasa, dan lain-lain masih berada di angka 10%.

DIAGRAM 4.2
Struktur Perekonomian Provinsi Jawa Barat Tahun 2015



Sumber : BPS, 2016

Sementara dalam data realisasi penerimaan dan pengeluaran pada **TABEL 4.4** dapat dilihat bahwa PAD Jawa Barat tiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini diikuti dengan peningkatan belanja baik tidak langsung maupun langsung dengan signifikan. Sedangkan dana perimbangan pada Tahun 2015 mengalami penurunan dari angka 3 triliun Rupiah menjadi 2 triliun Rupiah. Peningkatan angka belanja tidak langsung mengalami

signifikansi dengan angka rata-rata meningkat sebanyak 3 triliun Rupiah selama 3 tahun terakhir.

TABEL 4.4
REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PROVINSI
JAWA BARAT (DALAM RIBU RUPIAH)

PENERIMAAN	2013	2014	2015
Pendapatan Asli Daerah	12.360.109.870	15.038.153.310	16.032.856.414
Dana Perimbangan	2.950.532.546	3.260.505.636	2.506.877.512
PENGELUARAN			
Belanja Tidak Langsung	14.724.113.008	16.958.816.394	19.256.280.146
Belanja Langsung	3.672.632.315	3.839.172.071	5.161.325.715

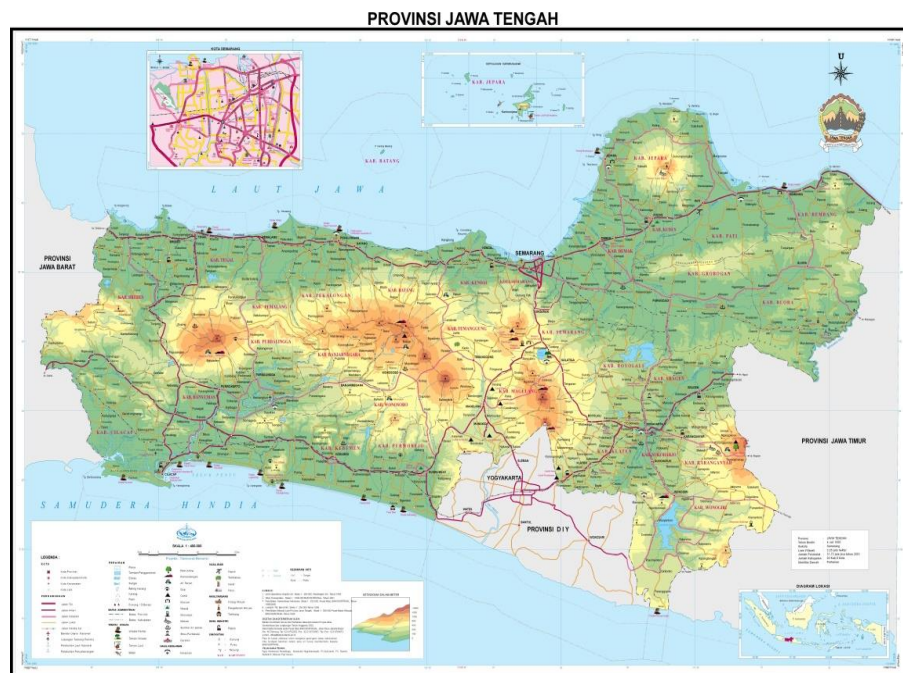
Sumber : BPS, 2016 (diolah)

3. Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa tengah memiliki luas total wilayah sekitar 32548 km² dengan total populasi sebanyak 39.298.887 jiwa. Provinsi ini memiliki 29 kabupaten dan 6 kota. Dengan Semarang sebagai ibu kotanya, Jawa tengah memiliki beberapa kota besar lain yang berada di kawasan pantai utara dan kota besar lain seperti Solo dengan perkembangan ekonomi yang pesat. Jawa Tengah memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5,5% tiap tahunnya.

Dengan wilayah luas seperti yang digambarkan pada **GAMBAR 4-4**, Provinsi ini berbatasan langsung dengan 3 provinsi lain, diantaranya Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Walaupun dengan wilayah seluas ini pusat perekonomian berada di Semarang, sering menyebabkan mobilitas ekonomi warganya sangat

tinggi. Perekonomian di provinsi ini juga sangat beragam, meski masih sebagian besar sektor pertanian masih mendominasi.



Sumber : BPS, 2016

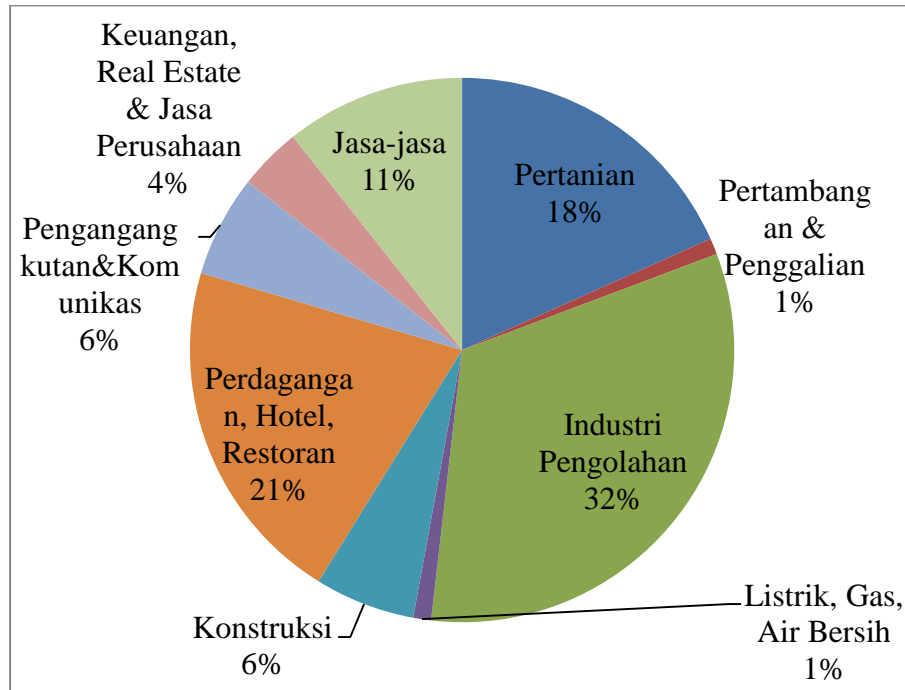
GAMBAR 4-4
Peta Provinsi Jawa Tengah

Dengan laju pertumbuhan ekonomi sekitar rata-rata 5,4% pada Tahun 2015 sektor perekonomian memiliki peluang untuk berkembang. Seperti yang diperlihatkan dalam **DIAGRAM 4.3** sektor dengan penyumbang pendapatan daerah tertinggi adalah Sektor industri pengolahan menempati posisi pertama dengan angka 32%, selanjutnya dengan angka 21% ada sektor perdagangan, hotel, dan restoran di posisi ketiga dengan sektor pertanian dengan 18%. Sementara sektor jasa-jasa berada pada angka 11%. Sementara sektor lain masih dibawah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri

sudah menjadi sektor utama yang dapat dikembangkan oleh provinsi ini dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

DIAGRAM 4.3

Struktur Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015



Sumber : BPS, 2016 (diolah)

TABEL 4.5

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PROVINSI JAWA TENGAH (DLM RIBU RUPIAH)

PENERIMAAN	2013	2014	2015
Pendapatan Asli Daerah	8.212.800.641	9.916.358.231	10.904.825.813
Dana Perimbangan	2.467.814.629	2.542.626.745	2.257.142.994
PENGELUARAN			
Belanja Tidak Langsung	9.213.696.623	10.646.904.181	12.396.063.966
Belanja Langsung	3.511.079.685	4.439.160.853	5.424.696.529

Sumber : BPS, 2016 (diolah)

Sementara dari data realisasi penerimaan dan pengeluaran Provinsi Jawa Tengah diatas dapat diketahui bahwa PAD setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sementara dana perimbangan mengalami fluktuasi namun stabil ada pada angka 2 triliun Rupiah. Senada dengan kenaikan signifikan PAD, belanja tidak langsung juga mengalami hal yang sama, kenaikan yang cukup signifikan sampai pada Tahun 2015 mencapai 12 triliun Rupiah. Hal tersebut tentu juga berlaku pada belanja langsung yang mengalami kenaikan secara signifikan dalam kurun waktu 3 tahun.

4. Provinsi DI Yogyakarta

Provinsi dengan luas wilayah sekitar 3185,80 km² dan dengan populasi sekitar 3452390 jiwa. Memiliki 4 kabupaten dan 1 kota. Yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo dan kota Yogyakarta sebagai ibu kota. Provinsi dengan menyandang *title* Daerah Istimewa ini dikarenakan status pemerintahannya yang masih menggunakan sistem kerajaan kesultanan. Meski provinsi ini memiliki luas wilayah yang lebih kecil dibanding dengan provinsi lain, Provinsi ini memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan lebih jauh. Berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah di sisi utara, barat dan Timur, dan samudra Hindia di sisi selatan. Provinsi ini selain memiliki potensi sejarah dan kebudayaan tinggi, potensi yang sedang gencar digalakkan adalah potensi wisata alamnya. Dengan fenomena alam Gunung Merapi di sisi utara, dan sepanjang pantai selatan yang

sudah dikelola dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah, menjadikan provinsi ini menjadi kaya dengan potensi pariwisatanya



Sumber : BPS, 2016

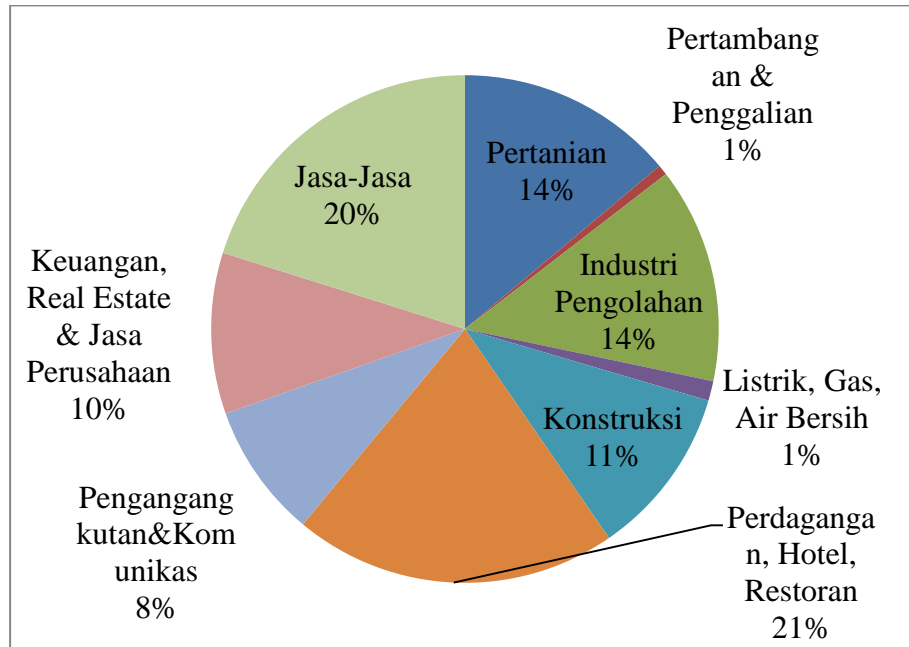
GAMBAR 4-5
Peta Provinsi DI Yogyakarta

Meski tergolong sebagai provinsi dengan luas wilayah kecil, Provinsi ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Terlebih dengan predikat sebagai Kota budaya dan Kota Pelajar, Provinsi ini memiliki jumlah pendatang cukup tinggi terutama wisatawan dan pelajar. Hal ini lah yang menjadi salah satu sektor unggulan dalam perekonomian Provinsi Yogyakarta.

Sektor pariwisata telah menjadi bagian terpenting dalam perekonomian di provinsi ini, mulai dari pariwisata alam sampai kebudayaan. Berbagai kegiatan perekonomian yang mendukung sektor pariwisata mulai berkembang dalam lebih dari 5 Tahun

terakhir. Kegiatan perekonomian masyarakat di provinsi ini juga sangat beragam diantaranya digambarkan dalam **DIAGRAM 4.4** berikut ini;

DIAGRAM 4.4
Struktur Perekonomian Provinsi DI Yogyakarta



Sumber : BPS, 2016 (diolah)

Dari grafik terlihat bahwa sektor perdagangan, hotel, dan restoran memiliki angka tertinggi yaitu dengan 21%, disusul dengan sektor jasa dengan 20% lalu sektor pertanian dan industri pengolahan memiliki porsi yang sama yaitu sekitar 14%. Sementara sektor lain masih cukup rendah dengan angka dibawah 10%

Meski memiliki potensi tinggi, provinsi ini masih dikenal cukup rendah dalam kemandirian dari segi pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan angka PAD provinsi ini yang masih rendah ari pada daerah Provinsi lain. Pada tahun 2015 lalu PAD provinsi ini mencapai Rp. 1.593.110.770.000, dan masih jauh dari pada provinsi lain. Namun

angka pertumbuhan ekonomi yang baik mendorong perekonomian untuk lebih baik. Dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5.4% pada Tahun 2015 lalu, kegiatan ekonomi masyarakat masih memiliki peluang untuk menunjukkan kemajuan.

TABEL 4.6
REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PROVINSI DI
YOGYAKARTA (DALAM RIBU RUPIAH)

PENERIMAAN	2013	2014	2015
Pendapatan Asli Daerah	1.216.102.750	1.464.604.954	1.593.110.770
Dana Perimbangan	957.561.851	1.013.811.390	1.021.886.268
PENGELUARAN			
Belanja Tidak Langsung	1.440.462.297	1.560.157.356	1.810.940.127
Belanja Langsung	1.069.181.078	1.420.910.964	1.685.485.375

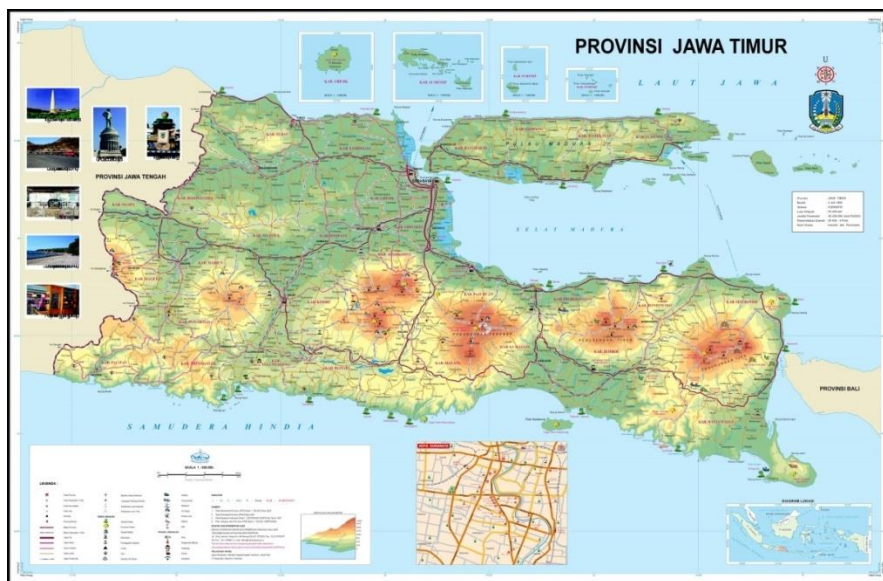
Sumber: BPS, 2016 (diolah)

Dari data diatas, meskipun rendah dari pada daerah lain PAD Yogyakarta mengalami kenaikan dan dibarengi dengan kenaikan dana perimbangan, belanja tidak langsung dan belanja langsung. Keempatnya mengalami kenaikan walau tidak cukup tinggi.

5. Provinsi Jawa Timur

Provinsi dengan luas total wilayah 47.922 km² ini adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia, dengan memiliki populasi sekitar 37.476.575 jiwa penduduk Jawa timur memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar. Jawa Timur memiliki 29 kabupaten dan 9 kota. Pulau Madura yang dahulunya terpisah, sejak Tahun 2010 Pulau Jawa dan Pulau Madura terhubung dengan Jembatan Suramadu.

Dengan adanya Jembatan pertama yang menghubungkan 2 pulau di Indonesia ini kegiatan administrasi pemerintahan masyarakat dan perekonomian menjadi lebih baik. Penyerapan pendapatan perkapita provinsi ini juga lebih baik daripada provinsi lain dengan nilai derajat desentralisasi mencapai 70% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan provinsi ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengelola keuangan daerahnya.



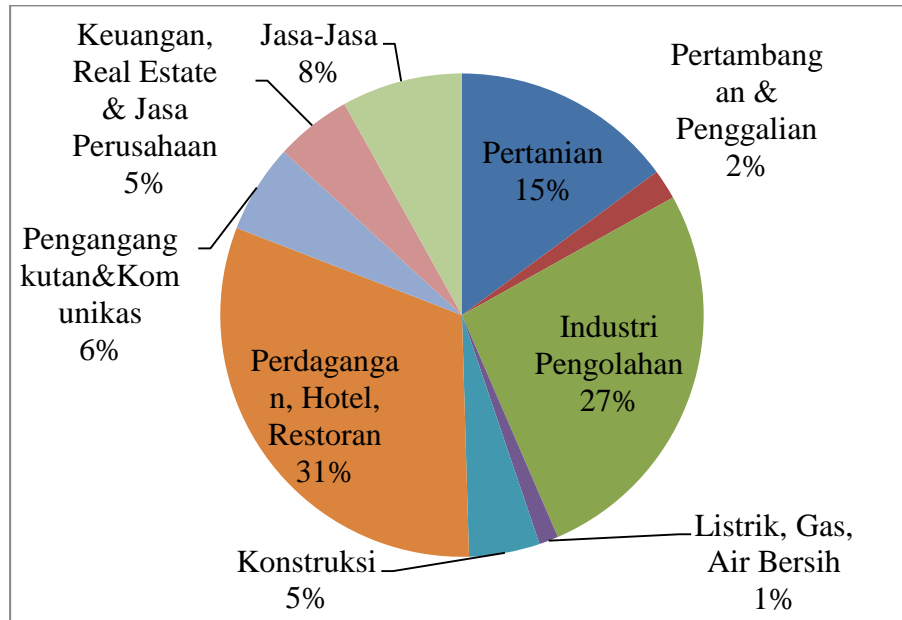
Sumber : BPS, 2016

GAMBAR 4-6
Peta Provinsi Jawa Timur

Dengan angka laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6,5% pada tahun 2015 perekonomian Jawa Timur berkembang dengan baik. Dengan angka derajat desentralisasi rata-rata 7,0 tingkat pengelolaan keuangan daerah ini juga sangat baik. Ada beberapa sektor yang turut meyumbang dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Perekonomian

di Jawa Timur dibagi menjadi kedalam beberapa sektor menurut diagram dibawah ini:

DIAGRAM 4.5
Struktur Perekonomian Provinsi Jawa Timur



Sumber : BPS, 2016

Di Jawa Timur sektor perdagangan, hotel, dan restoran berada di angka 31%, Menjadikan sektor ini penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah. Selain itu sektor ini juga menjadi salah satu sektor unggulan yang dimiliki provinsi ini. Sedangkan pada tempat kedua industri pengolahan dengan angka 27%, sektor ini memiliki angka yang cukup tinggi dan masih memiliki potensi untuk dikembangkan, selanjutnya pertanian dengan angka 15%, Sementara sektor lain seperti Konstruksi, Transportasi, pertambangan, listrik, gas, air bersih dan jasa-jasa masih rendah dengan angka berada dibawah 10%.

TABEL 4.7
REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PROVINSI
JAWA TIMUR (DALAM RIBU RUPIAH)

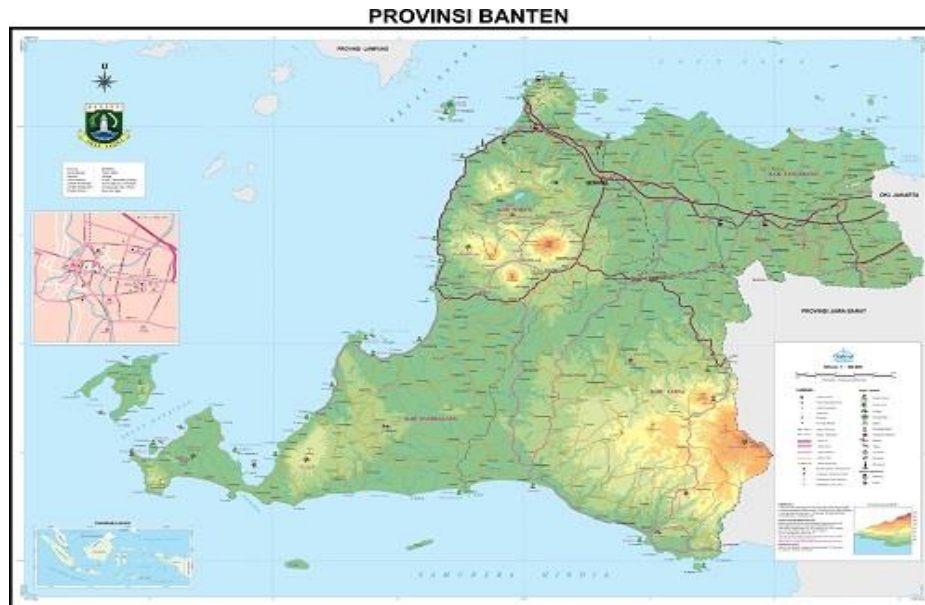
PENERIMAAN	2013	2014	2015
Pendapatan Asli Daerah	11.596.376.615	14.442.216.520	15.402.647.675
Dana Perimbangan	2.919.371.008	3.485.336.764	3.115.619.118
PENGELUARAN			
Belanja Tidak Langsung	10.689.813.108	13.700.106.993	15.074.834.724
Belanja Langsung	6.048.844.119	6.306.212.284	7.871.472.846

Sumber : BPS, 2016 (diolah)

Sementara itu dari data realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Timur diatas terlihat bahwa kondisi PAD semakin meningkat dalam waktu 3 tahun, hal ini juga dibarengi dengan meningkatnya belanja pemerintah baik tidak langsung maupun langsung. Meski pada Tahun 2015 dana perimbangan mengalami sedikit pengurangan.

6. Provinsi Banten

Provinsi Banten adalah provinsi paling muda diantara provinsi lain di Pulau Jawa, dengan luas wilayah hanya sekitar 9160 km² provinsi ini merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Barat. Banten memiliki populasi sekitar 10.469.523 jiwa. Banten dibagi menjadi 4 Kabupaten dan 4 Kota. Berikut peta Provinsi Banten;

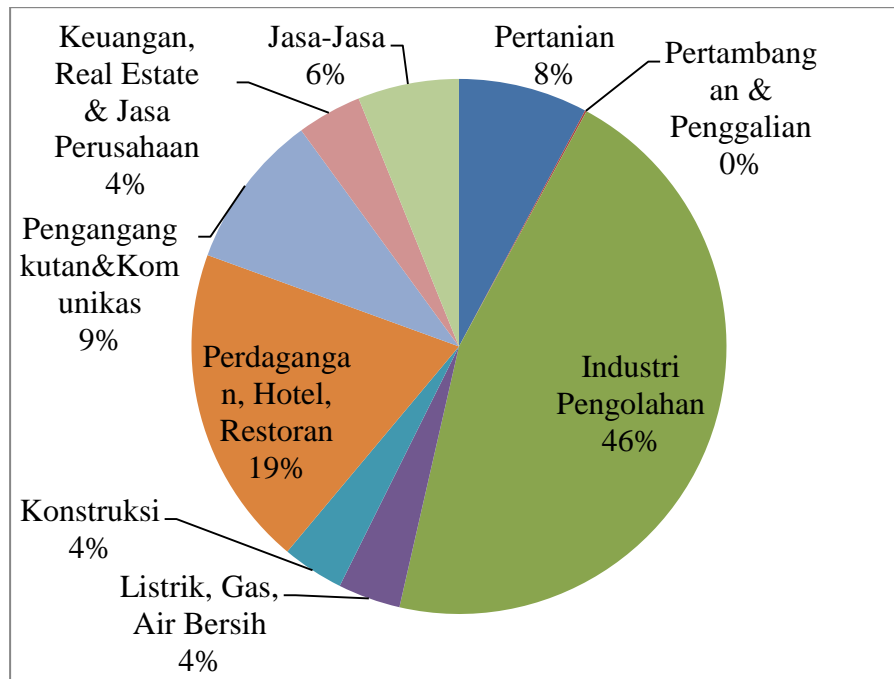


Sumber : BPS, 2016

GAMBAR 4-7
Peta Provinsi Banten

Perekonomian di Banten menunjukkan hal positif dengan laju pertumbuhan 5,8% pada tahun 2015 lalu. Sektor penyumbang Perekonomian di Banten terbagi menjadi beberapa sektor diantaranya seperti yang diperlihatkan dalam **DIAGRAM 4.6**. Sektor industri pengolahan memiliki angka tertinggi yaitu sekitar 46% hampir setengah dari sektor pekerjaan penyumbang pendapatan lain di Banten adalah pada sektor industri. Hal ini menunjukkan pesatnya pertumbuhan ekonomi Banten salah satunya dikarenakan sektor Industri yang cukup maju. Sementara sektor perdagangan, hotel dan restoran berada pada posisi kedua dengan 19%. Sementara sektor lain seperti Pertanian, Konstruksi, Jasa-jasa masih sangat rendah dengan angka berada dibawah 10%.

DIAGRAM 4.6
Struktur Perekonomian Provinsi Banten



Sumber : Data BPS, 2016 (diolah)

TABEL 4.8
REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PROVINSI BANTEN (DALAM RIBU RUPIAH)

PENERIMAAN	2013	2014	2015
Pendapatan Asli Daerah	4.118.551.716	4.899.125.741	4.972.737.619
Dana Perimbangan	1.126.004.172	1.159.872.633	976.787.586
PENGELUARAN			
Belanja Tidak Langsung	3.316.069.657	4.013.607.703	4.758.963.213
Belanja Langsung	1.979.069.495	2.178.547.864	3.325.176.946

Sumber : Data BPS, 2016 (diolah)

Dari data realisasi penerimaan dan pengeluaran Provinsi Banten diatas dapat diketahui bahwa PAD setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sementara dana perimbangan mengalami

fluktuasi namun stabil ada angka 2 triliun Rupiah. Senada dengan kenaikan signifikan PAD, belanja tidak langsung juga mengalami hal yang sama, kenaikan yang cukup signifikan sampai pada Tahun 2015 mencapai 12 triliun Rupiah. Hal tersebut tentu juga berlaku pada belanja langsung yang mengalami kenaikan secara signifikan dalam kurun waktu 3 tahun.

C. Kondisi Ketimpangan

Pulau Jawa adalah pulau dengan penduduk paling padat diantara pulau lain di Indonesia, dengan hampir 50% lebih penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, pendapatan perkapita masing-masing provinsi cukup tinggi. Hal ini dikarenakan taraf hidup penduduk Pulau Jawa yang lebih tinggi. Namun dengan tingkat perekonomian tinggi ini masih dijumpai angka kemiskinan yang masih relatif tinggi di beberapa daerah, hal ini yang menunjukkan ketimpangan yang terjadi pada daerah tersebut.

Angka ketimpangan pada keenam provinsi di Pulau Jawa dihitung menggunakan Indeks Williamson, jadi ketimpangan pada hal ini adalah ketimpangan pendapatan. Indeks Williamson sendiri didapat dari rasio antara PDRB daerah dengan PDB nasional dan PDRB per kapita. Data ketimpangan pendapatan pada keenam provinsi di Pulau Jawa ditunjukkan dalam **TABEL 4.9**. Dari data ketimpangan tersebut angka ketimpangan paling tinggi ada pada Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata 0,47 meski angka tersebut tergolong sedang karena masih dibawah 0,5. Sedangkan Provinsi lain memiliki angka ketimpangan yang cukup rendah yaitu

sekitar rata-rata dibawah 0,2. Dengan angka ketimpangan pendapatan rendah provinsi-provinsi di Pulau Jawa dapat dikatakan memiliki angka kemandirian yang cukup tinggi.

TABEL 4.9
INDEKS WILLIAMSON (KETIMPANGAN PENDAPATAN)
PROVINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2008-2015

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2008	0,461	0,063	0,114	0,034	0,025	0,012
2009	0,463	0,051	0,099	0,029	0,010	0,006
2010	0,481	0,084	0,121	0,037	0,028	0,028
2011	0,490	0,069	0,107	0,033	0,009	0,022
2012	0,498	0,055	0,093	0,029	0,008	0,016
2013	0,504	0,042	0,081	0,026	0,024	0,011
2014	0,511	0,032	0,070	0,022	0,037	0,007
2015	0,496	0,022	0,057	0,019	0,046	0,054

Sumber : Data BPS, 2016 (diolah)

D. Kondisi Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi dihitung dengan menggunakan rasio Pendapatan Asli daerah dengan Total penerimaan daerah. Derajat ini mengukur kondisi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kemampuan fiskal daerah tersebut dari sisi penerimaan. Angka derajat fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri. Dari hasil pengolahan nilai desentralisasi fiskal pada **TABEL 4.10** dapat disimpulkan bahwa kemampuan semua provinsi di Pulau Jawa sudah sangat baik dengan angka diatas 50%. Kemampuan Provinsi dalam mengelola keuangan daerah dari sisi penerimaan ini dinilai sangat baik walau mengalami beberapa fluktuasi.

TABEL 4.10
DERAJAT DESENTRALISASI PENERIMAAN PROVINSI DI
PULAU JAWA PADA TAHUN 2008-2015 (DALAM %)

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2008	54,39	72,51	71,08	58,87	70,9	70,65
2009	55,07	71,64	31,87	50,16	72,92	69,28
2010	55,99	74,44	72,21	53,86	74,93	73,95
2011	63,09	76,92	73,72	54,03	77,41	77,1
2012	62,3	59,15	56,69	46,23	62,57	62,73
2013	67,95	64,25	61,55	47,08	66,75	66,11
2014	48,33	67,4	65,42	46,65	69,52	69,31
2015	76,2	66,78	64,8	46,86	69,29	67,86

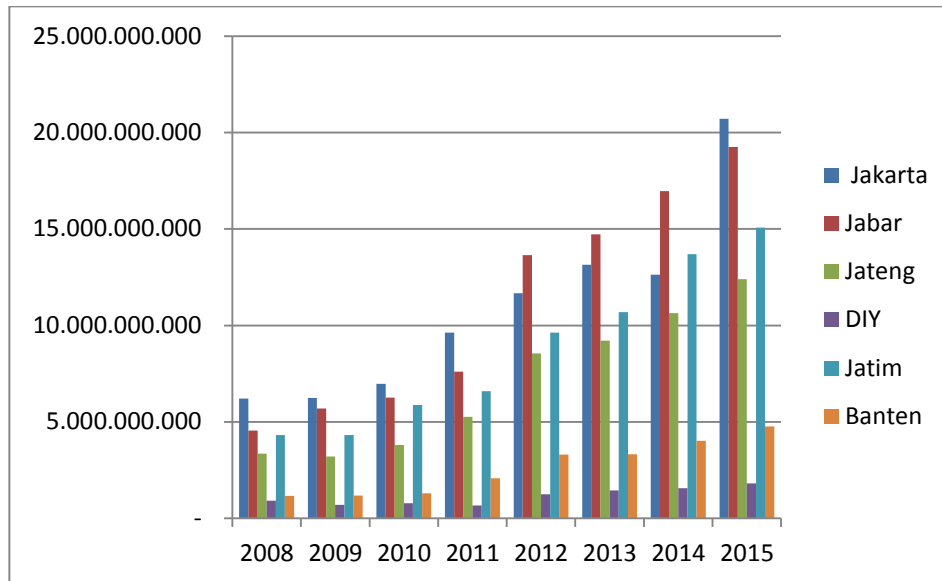
Sumber : BPS, 2016 (diolah)

Provinsi Jawa Timur memiliki kemampuan pengelolaan keuangan daerah sangat baik diantara kelima provinsi lain dengan rata-rata derajat desentralisasi sebesar 70,5%. Sedangkan Provinsi DI Yogyakarta memiliki nilai desentralisasi fiskal yang lebih rendah dibanding dengan provinsi lain yaitu dengan rata-rata 50,4% , namun angka ini masih dalam kondisi nilai desentralisasi fiskal yang sangat baik.

E. Kondisi Belanja Pemerintah Daerah

Salah satu komponen yang dapat menunjukkan bagaimana kondisi desentralisasi pengeluaran adalah angka belanja pemerintah provinsi. Realisasi belanja pemerintah ini dijadikan tolak ukur seberapa besar peran pemerintah dalam mengelola penerimaan dari penerimaan daerah dan belanjakan kembali untuk kepentingan masyarakat luas.

GRAFIK 4.0.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG PROVINSI DI PULAU JAWA
TAHUN 2008-2015 (DALAM RIBU RUPIAH)



Sumber : BPS, 2016 (diolah)

Kondisi belanja tidak langsung pada masing-masing Provinsi memiliki kondisi yang berbeda-beda. Dalam grafik diatas dapat dilihat bahwa sejak Tahun 2008 sampai 2010, Provinsi Jakarta menempati kedudukan tertinggi diantara keenam provinsi lain namun pada tahun berikutnya Provinsi Jawa Barat mendahului angka belanja tidak langsung Provinsi Jakarta, hal ini berlangsung selama tiga tahun sejak Tahun 2012, 2013, dan 2014. Pada Tahun 2015 Provinsi Jakarta kembali memiliki jumlah belanja tidak langsung tertinggi. Sedangkan provinsi dengan belanja tidak langsung terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta, dengan angka yang terus berflutuaksi, jumlah belanja tidak langsung DIY masih terendah dibanding dengan daerah lain. Sementara itu bagaimana dengan kondisi pengeluaran pemerintah belanja langsung, berikut datanya:

TABEL 4.11
PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PROVINSI DI PULAU
JAWA TAHUN 2008-2015 (DALAM MILIYAR RUPIAH)

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2008	9.755	1.567	1.802	537	1.881	1.088
2009	13.251	2.501	1.988	630	3.283	1.247
2010	14.580	2.754	2.171	566	4.336	1.529
2011	16.796	2.688	9.213	628	5.096	1.819
2012	19.885	3.274	9.837	814	5.677	2.017
2013	25.152	3.672	3.511	1.069	6.048	1.979
2014	25.167	3.839	4.439	1.420	6.306	2.178
2015	22.324	5.161	5.424	1.685	7.871	3.325

Sumber : BPS, 2016 (diolah)

Senada dengan belanja tidak langsung, pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja langsung juga masih didominasi oleh belanja pegawai. Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah Belanja Langsung tertinggi diantara provinsi-provinsi lain. Sedangkan terendah pada Provinsi DI Yogyakarta.

F. Kondisi Inflasi

Inflasi sangat berpengaruh pada kondisi pasar. Kondisi pasar menentukan bagaimana perekonomian suatu daerah berjalan. Inflasi dalam jangka panjang akan menentukan penerimaan pemerintah maupun pengeluaran pemerintah. Harga pasar sangat ditentukan dengan kondisi perekonomian konsumen dan produsen baik rumah tangga maupun pemerintah. Maka dalam mengetahui pengaruh inflasi, berikut data inflasi yang terjadi pada beberapa provinsi, angka inflasi ini merupakan

hasil olahan sampel dari angka inflasi dari kota-kota besar pada masing-masing provinsi yang ada.

TABEL 4.12
KONDISI INFLASI PROVINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2008-2015
(DALAM %)

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2008	11,11	10,23	10,34	9,88	8,73	13,91
2009	2,34	2,11	5,83	3,6	3,39	4,11
2010	6,21	4,53	7,11	7,38	7,33	6,18
2011	3,97	2,75	2,87	3,88	4,72	2,78
2012	4,52	4,02	4,85	4,31	4,39	4,41
2013	8	7,97	8,19	7,32	7,52	9,16
2014	8,95	7,76	8,53	6,59	7,9	11,27
2015	3,3	3,93	2,56	3,09	3,43	4,67

Sumber : BPS, 2016 (diolah)

Angka inflasi yang terjadi pada setiap provinsi sangat berfluktuasi, masing-masing daerah pernah mengalami angka inflasi yang cukup rendah atau cukup tinggi.

G. Kondisi Tenaga Kerja

Tenaga kerja di Indonesia dikenal karena jumlahnya yang banyak dan tersebar luas di seluruh Indonesia, karena jumlah penduduk besar, jumlah angkatan kerja di Indonesia juga melimpah. Tenaga kerja secara teori berkaitan dengan pendapatan perkapita masyarakat, sehingga bagaimana pengaruh tenaga kerja itu sendiri dalam perekonomian khususnya pada ketimpangan ekonomi akan dibahas dalam penelitian ini. Jumlah penduduk di wilayah keenam provinsi Pulau Jawa sangat tinggi. Hal ini menyebabkan banyak hal positif di antaranya pertumbuhan

ekonomi. Berikut ini data jumlah tenaga kerja di keenam provinsi di Pulau Jawa:

TABEL 4.13
JUMLAH TENAGA KERJA PROVINSI DI PULAU JAWA TAHUN
2008-2015 (DALAM RIBU Jiwa)

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2008	4.191	16.480	15.463	1.892	18.882	3.668
2009	4.118	16.901	15.835	1.895	19.305	3.704
2010	4.689	16.942	15.809	1.775	18.698	4.583
2011	4.588	17.454	15.916	1.798	18.940	4.529
2012	4.838	18.321	16.132	1.867	19.081	4.605
2013	4.712	18.413	15.964	1.847	19.266	4.637
2014	4.634	19.230	16.550	1.956	19.306	4.853
2015	4.724	18.791	16.435	1.891	19.367	4.825

Sumber : BPS, 2016 (diolah)

Jumlah tenaga kerja tertinggi dari keenam provinsi ada pada Provinsi Jawa Timur, jumlah ini tentu tersebar pada wilayah yang luas dan terbagi dalam beberapa sektor. Sementara, Yogyakarta adalah provinsi dengan jumlah tenaga kerja terendah.